

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT,atas segala rahmat,taufik,dan limpahan Karunia – Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) ini memaparkan hasil Evaluasi dan pengukuran Kinerja pelaksanaan serangkaian Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019 sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini di dasarkan pada data serta berpedoman kepada hasil analisis dan perbandingan dengan Kinerja OPD tahun sebelumnya,khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian LkjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta bantuan dan kerja sama semua Pejabat dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga LkjIP ini dapat tersusun dengan baik disertai doa Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan meridhoi segala upaya kita semua.Amin.

Tenggarong, Februari 2020

Sekretaris DPRD
KabupatenKutaiKartanegara.



H. M. Ridha Darmawan. SP.,MP

Pembina Utama Muda
NIP. 19701117 199803 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 adalah merupakan penyampaian informasi dan dinamika perkembangan organisasi dalam realitas secara tertulis yang berisikan Capaian Kinerja SKPD yang telah dicapai sesuai Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama serta Rencana Strategis organisasi beserta target Sasaran dan Tujuan Kinerja Organisasi tahun 2019. Adapun maksud dan tujuan disusunnya LAKIP/LKjIP adalah sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban secara tertulis terhadap pelaksanaan berbagai program kerja organisasi yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama organisasi dan Penetapan Kinerja organisasi pada Tahun 2019, dan diharapkan laporan ini dapat dijadikan bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun yang akan datang.

Berdasarkan Rencana kerja Sekretariat DPRD tahun 2019 telah diupayakan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja organisasi yang sinergis dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kontrak Perjanjian Kerja (Penetapan Kinerja) Sekretaris DPRD dengan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 serta RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2016 – 2021 yang secara Konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Adapun sesuai hasil capaian realisasi kinerja yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan dalam laporan ini meliputi 54 (Lima Puluh Empat), 6 (Enam) jenis program dan jenis sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian kinerja kegiatan dan program telah berhasil di capai dengan baik dengan daya serap anggaran yang baik pula pada tahun anggaran 2019 ini.

Dalam mewujudkan Sasaran strategis Kesekretariatan DPRD, Sekretariat DPRD memperoleh alokasi Anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp.58.123.112.975,-. Anggaran sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami Penambahan anggaran dalam APBD-P sebesar Rp.67.179.563.707,- dari pagu murni APBD 2018 sehingga mengalami Peningkatan Anggaran sebesar Rp.9.056.450.732,- dan apa bila dibandingkan dengan Anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp.68.678.318.529,-. Maka Anggaran 2019 terjadi Penurunan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 1.498.754.822,-

Selain itu silpa anggaran keuangan pada Tahun 2019 ini mengalami Peningkatan dibandingkan pada tahun 2018 yaitu pada tahun 2019 ini besarnya silpa adalah sebesar Rp.6.629.180.040,-

Sedangkan pada tahun 2018 silpnya adalah sebesar Rp.9.404.164.087,-pelaksanaan kinerja organisasi berjalan lancar dan tertib walaupun masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan beberapa permasalahan, namun pada tahun mendatang, akan diupayakan untuk mencari jalan keluar atau solusi,sehingga permasalahan – permasalahan pada tahun 2019 ini tidak terulang lagi pada tahun yang akan datang.

Dalam proses pencapaian kinerja tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan pokok yang dirasakan cukup menghambat aktivitas kinerja organisasi dan diantaranya Masih lemahnya kemampuan dan kurangnya pengetahuan para pengelola kegiatan, khususnya mengenai penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran. Kurang jelasnya pernyataan indikator kinerja kegiatan, baik itu pada kelompok Input, Output dan Outcome, mempengaruhi akurasi pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja kegiatan dan program.Untuk itu upaya yang ditempuh pada tahun yang akan datang adalah perbaikan pernyataan indikator kinerja pada dokumen–dokumen perencanaan yang menjadi dasar penilaian kinerja organisasi, antara lain dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Indikator Kinerja Utama Kabupaten yang masih belum dijelaskan secara mudah untuk menampilkan mata anggaran yang menjadi tolok ukur sasarannya. Dan diupayakan pada tahun yang akan datang Indikator anggaran pada Indikator utama Kabupaten dapat terisi secara jelas. Adapun untuk kegiatan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara,dengan volume dan jadwal kegiatan maupun tolok ukur kegiatan yang terlalu padat, diharapkan dapat dijadwalkan dengan lebih tertib sehingga dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun upaya dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja tahun 2019 dan tahun yang akan datang sehingga target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dapat terwujud maka saran dan solusi yang akan dilakukan diantaranya adalah Meningkatkan dan mengikut sertakan para pelaksana kegiatan dalam bentuk pelatihan teknis perencanaan kinerja dan penganggaran, dan sosialisasi peraturan pendukungnya. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan SKPD teknis yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidangnya.Melakukan pengawasan internal dengan penerapan metode SPIP dan evaluasi kegiatan secara berkala dan berjenjang sesuai struktur organisasi dan Tupoksi masing - masing. Meningkatkan komunikasi, koordinasi serta konsultasi dengan pimpinan dan anggota DPRD, agar seluruh aktivitas program kerja DPRD dapat terintegrasi dengan baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Struktur Organisasi dan Tupoksi	2
I.3 Maksud dan Tujuan	8
I.4 Sistematika Penyusunan LAKIP	9
I.5 Sumber Daya Manusia	9
I.6 Sarana dan Prasarana Kantor	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	15
2.1 Renstra Sekretariat DPRD	16
2.2 Rencana Kerja Tahun 2019	20
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2019	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019	22
3.2 Realisasi Keuangan	29
BAB IV. PENUTUP	33
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

Lampiran 1	:	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
Lampiran 2	:	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja tahun 2019 dengan Target Renstra	
Lampiran 3	:	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019	
Lampiran 4	:	Realisasi kinerja Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018	
Lampiran 5		Rencana Kinerja Tahun 2019	
Lampiran 6		Indikator Kinerja Utama	
Lampiran 7	:	Rapat alat kelengkapan Dewan	
Lampiran 8		Rencana Kinerja Tahunan	
Lampiran 9		Rekapitulasi Barang Ke Neraca	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran Strategis sesuai tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga Pemerintahan yang bergerak di bidang kebijakan politik daerah bersama bupati yang dibentuk oleh negara dan berkedudukan di daerah yang memiliki peran strategis di bidang legislasi, budgeting dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menghadapi situasi lingkungan politik yang terus berkembang, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan fungsi dan hak serta kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam mengantisipasi, memperjuangkan, menyerap aspirasi merupakan konsekuensi dari adanya pergeseran peran dan kedudukan DPRD sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. sebagaimana Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada Kab. Kutai Kartanegara dimana Perda ini didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Dalam Undang-undang ini khususnya dalam pasal 123 ayat (6).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Sekretariat DPRD untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi, yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, secara profesional dan optimal. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD yang penjabarannya perlu dijelaskan melalui tupoksi dan uraian tugas secara rinci sehingga dapat menggambarkan dinamika aktivitas kerja organisasi yang efektif dan modern.

Dalam Peraturan Bupati 47 Tahun 2016 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan dan administratif terhadap DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI & TUPOKSI

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

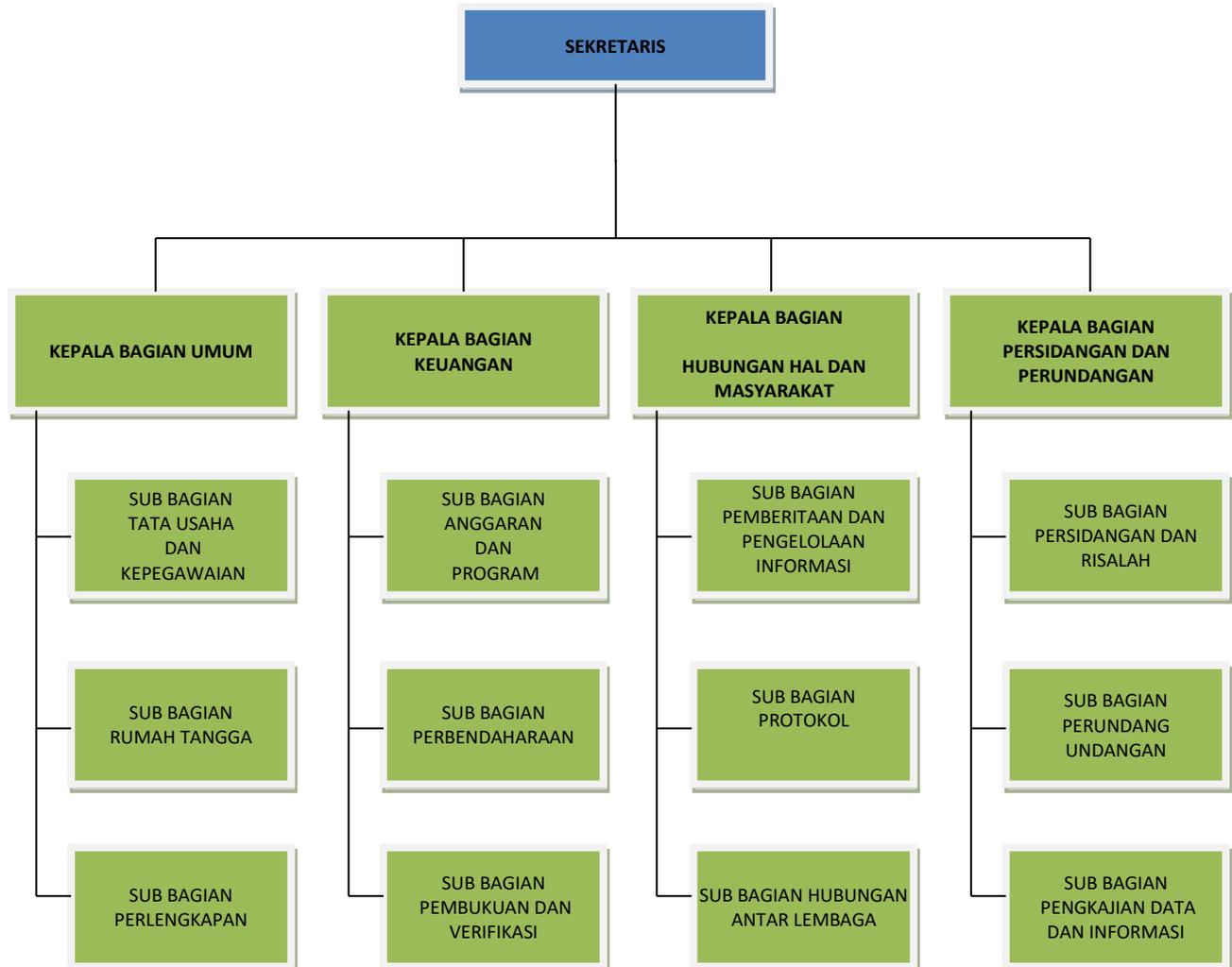
- a. Sekretaris DPRD
- b. Kepala Bagian Umum membawahi :
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Rumah Tangga.
 - Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Kepala Bagian Keuangan, membawahi :
 - Sub Bagian Anggaran dan Program.
 - Sub Bagian Perbendaharaan.
 - Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
- d. Kepala Bagian HAL dan Kemasyarakatan membawahi :
 - Sub Bagian Protokol
 - Sub Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Informasi.
 - Sub Bagian Hubungan antar Lembaga
- e. Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan membawahi:
 - Sub Bagian Perundang Undangan
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - Sub Bagian Pengkajian Data dan Informasi

f. Kelompok Jabatan Fungsional

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Adapun Bagan struktur Sekretariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara dapat digambarkan seperti dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISSASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



a) TUGAS POKOK

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka berimbas dengan perubahan tatanan organisasi pemerintahan

di seluruh daerah di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kabupaten Kutai Kartanegara memutuskan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada Kab. Kutai Kartanegara Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2016 tersebut dijabarkan lagi dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara,.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara disebutkan bahwa Tugas Pokok Sekretariat Dewan adalah :

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

b) FUNGSI

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut sebelumnya disesuaikan dengan Perda dan Perbub Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten.

c) HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING DILUAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI SETWAN.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam Penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa DPRD menyelenggarakan fungsi legeslasi, anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu secara langsung atau tidak langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan tugas tersebut sebagai tugas diluar tugas pokok dan fungsi Sekwan, yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan Fungsi

Setwan dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas diluar tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Sekretariat DPRD;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Sekretariat DPRD;
- c. Merumuskan rencana program kerja Sekretariat DPRD
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Sekretariat DPRD;
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Sekretariat DPRD;
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Sekretariat DPRD;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPI Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), SOP dan SPM urusan kepala Sekretariat DPRD; dan
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan Fungsi Anggaran dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penyusunan Program

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan anggaran dan penyusunan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja, LkjIP, dan LPPD Sekretariat DPRD;
- d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), LKPJ dan LKPD;
- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Anggaran DPRD dan Perubahan Anggaran DPRD, Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- g. Merencanakan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Anggaran dan Penyusunan Program;
- i. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Anggaran dan Penyusunan Program;
- j. Menrencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Anggaran dan Penyusunan Program; dan

- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

- a. Memobiliasi pakar yang ahli untuk memberikan masukan materi dalam bidang pengawasan.
- b. Membantu menyiapkan dan memberikan data mengenai sesuatu obyek mendesak yang bermasalah dilingkungan masyarakat daerah yang perlu dan patut segera diselesaikan untuk dilakukan pengawasan.
- c. Membantu menyiapkan data riil mengenai sesuatu obyek yang akan dilakukan pengawasan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban secara tertulis terhadap berbagai program kerja organisasi yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama organisasi dan penetapan Kinerja organisasi pada Tahun 2019, dan diharapkan laporan ini dapat dijadikan bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun yang akan datang.

Pengukuran dan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah didukung dengan elektronik *Performance (E-Performance)* yaitu aplikasi sistem akuntabilitas kinerja seperti Aplikasi SIMDA, E-Monev, dan lain-lain yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Adapun dalam rangka memberikan gambaran terhadap proses capaian kinerja organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, maka LAKIP / LKjIP khususnya disekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**

Terdiri atas gambaran umum organisasi, struktur dan Tupoksi, Maksud dan Tujuan, sistematika penyusunan LAKIP / LKjIP, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana kantor.

BAB II : **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Memuat gambaran singkat Rencana Strategis dan ringkasan/ikhtisar, Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

BAB III : **Akuntabilitas Kinerja**

1. Capaian Kinerja
2. Realisasi Anggaran

BAB IV : **Penutup**

Memuat simpulan umum atas capaian kinerja serta Solusi

Lampiran- Lampiran.

1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2019 jumlah pegawai adalah 355 orang. jumlah tersebut terdiri dari 191 orang ASN, 131 orang Tenaga Harian Lepas (THL), 20 orang Pengamanan Dalam (Pamdal) dan 13 orang Tenaga Ahli.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Selengkapnya jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kepegawaian

Jenis Kepegawaian	Jumlah	
ASN	191	Orang
Tenaga Harian Lepas (THL)	131	Orang
Pegawai Harian Lepas (PHL)	-	Orang
Pengamanan Dalam (Pamdal)	13	Orang
Tenaga Ahli	13	Orang
Tim Pakar	-	Orang
<i>Jumlah</i>	<i>348</i>	<i>Orang</i>

a) Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikan

Pendidikan Umum	Jumlah	
SD	1	Orang
SMP Sederajat	5	Orang
SMA Sederajat	122	Orang
Diploma 3 (Sarjana Muda)	2	Orang
Sarjana	45	Orang
Pasca Sarjana	16	Orang
<i>Jumlah</i>	<i>191</i>	<i>Orang</i>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

b) Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan

1. Diklatpim II	1	Orang
2. Diklatpim III	5	Orang
3. Diklatpim IV	11	Orang
Jumlah	17	Orang

c) Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon

Golongan	Eselon				Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV		
IV/c		1				1
IV/b			1			1
IV/a			2	3	3	8
III/d					29	29
III/c					16	16
III/b					7	7
III/a					16	16
II/d					45	45
II/c					51	51
II/b					8	8
II/a					8	8
I/d						
I/c	-				1	1
I/b	-					
I/a	-					
Jumlah						
Total		1	3	3	184	191

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD
 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1.6 SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2022 mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung sarana prasarana yang tersedia sebagaimana sesuai tabel :

Tabel 2 :
*Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara*

No	Fasilitas	Jumlah	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang Tanah
2	Gedung DPRD Kab. Kukar terdiri dari :		
	Gedung A (Depan)	1	2 Lantai
	Gedung B (Samping Kiri)	1	2 Lantai
	Gedung C (Samping Kanan)	1	2 Lantai
	Gedung D (Tengah)	1	2 Lantai
	Gedung E (Belakang Tengah)	1	2 Lantai
	Gedung F (Belakang Kanan)	1	1 Lantai
	Gedung G (Belakang Kiri)	1	1 Lantai
	Gedung H (Samping Kiri Tengah)	1	1 Lantai
Gedung I (Samping Kanan Belakang)	1	1 Lantai	
2	Ruangan Kerja Pimpinan :		
	Ruangan Kerja Ketua	1	Ruang Gedung A
	Ruangan Kerja Wakil Ketua	3	Ruang Gedung A
	Ruangan Kerja Anggota	45	Ruang Gedung B lantai I, Lantai II dan Gedung C Lantai I dan Lantai II
	Ruangan Kerja Komisi	4	Ruang Gedung A
	Ruangan Kerja Fraksi	8	Ruang Gedung B & C
	Ruangan Kerja BK	1	Ruang Gedung A
	Ruangan kerja Banleg.	1	Ruang Gedung A
3	Ruang Rapat :		
	Ruang Rapat	1	Ruang Gedung A
	Ruang VIP	4	Ruang Gedung A dan C
	Ruang Paripurna	1	Ruang Gedung D
	Ruang Rapat	4	Ruang Gedung A, B, C dan D

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

4	Ruangan Sekretariat :		
	Ruangan Kerja Sekwan	1	Ruang Gedung D
	Ruangan Kerja Kepala Bagian	4	Ruang Gedung D
	Ruangan Kerja Kepala Sub Bagian	12	Ruang Gedung D
	Ruangan Kerja Tenaga Ahli	1	Ruang Gedung A
	Ruangan Perpustakaan / Medis	1	Ruang Gedung G
	Ruangan Arsip	4	Ruang Gedung
	Pos Penjaga	4	Pos Depan dan Belakang
	Musholla	1	Ruang Gedung F
	Kantin	1	Gedung F
5	Gedung Perlengkapan :		
	- Gudang ATK	1	Ruang Gedung H
	- Gudang Inventaris	1	Ruang Gedung G
	- Rumah Genset	1	Ruang Gedung H
6	Rumah Dinas Jabatan		
	- Rumah Ketua DPRD	1	Kondisi : Baik
	- Rumah Wakil Ketua DPRD	3	Kondisi : Baik
	- Rumah Anggota DPRD	42	Kondisi : Kurang Baik

Tabel 3 :
Sarana Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
I	Kendaraan Dinas Roda 4	
1	Toyota INNOVA. E MT	4 Unit
2	Toyota Fortuner	7 Unit
3	Toyota CAMRY	1 Unit
4	Toyota AVANSA VELOZ 1.5 MT	1 Unit
5	Toyota CAMRY 2.2 V AT	1 Unit
6	NISSAN NAVARA	3 Unit

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

7	NISSAN TEANA (SEDAN)	1 Unit
8	SUZUKI ERTIGA	1 Unit
9	HILUX DOBLE CABIN	5 Unit
10	HILUX PU 2.0 PICK UP	1 Unit
11	MITSUBISHI L200 STRADA	1 Unit
12	MAZDA CX9	1 Unit
II	Kendaraan Dinas Roda 2	
1	Honda	14 Unit
2	Honda Supra 125	16 Unit
3	Honda Beat FI-CBS	29 Unit
4	Honda Vario Techno	5 Unit
5	Honda Verza	2 Unit
6	Honda MEGA PRO	6 Unit
7	Yamaha / Mio	20 Unit
8	Yamaha / Mio J	14 Unit
9	Yamaha NEW IXION	4 Unit
10	Kawasaki KLX	5 Unit
11	Kawasaki D-Trackter	2 Unit
III	Kendaraan Dinas Sungai	
1	Yamaha / Speed Boat	3 Unit

*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
(Bagian Umum dan Perlengkapan)*

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program. Padahakekatnya Renstra adalah merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis OPD sesuai Tupoksinya demi tercapainya sasaran berupa peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019, adapun langkah-langkah upaya dalam pencapaiannya adalah :

1. melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu,
2. terwujudnya sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakansuasana kerja yang kondusif,
3. pengelolaan anggaran yang akuntabel dan manajemen kepegawaian yang handal, profesional, serta sistem perencanaan yang tepat, benar dan akurat,
4. penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1 RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Renstra (Rencana Strategis) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengacu dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 -2021. Sehingga untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Secara ringkas substansi Renstra Sekretariat DPRD dapat diilustrasikan sebagai berikut:

I. VISI

Visi merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Pernyataan Visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengantisipasi dengan menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan”

Visi tersebut mengandung makna adanya upaya yang maksimal dari seluruh aparatur untuk bisa lebih profesional didalam pelaksanaan tugas pelayanan dan kelancaran sehingga mampu menjadi institusi yang profesional dan berkualitas, yang disepakati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekaligus yang melatar belakangi lahirnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri.
2. Kearifan.
3. Berperilaku secara organisasional yaitu berintegrasi satu sama lain dalam memecahkan masalah atau krisis.

II. MISI

Guna mewujudkan visi diatas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan peran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD bahwa tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pengawasan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang profesional.

Perumusan misi organisasi harus memperhatikan dan menampung masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan hal tersebut, maka Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

“Memantapkan Reformasi, Birokrasi untuk Rakyat”

III. TUJUAN

Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataannya (*das sein*), pada kurun waktu tertentu. Tujuan merupakan penjabaran dari MISI dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan, Pemantauan tujuan yang dimaksud sebagai arah perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Keterkaitan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam misi yang Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
2. Meningkatkan pelayanan Publik Pemerintah Daerah

IV. SASARAN

Sasaran merupakan tujuan antara dari perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan. Sasaran merupakan bagian Integral dalam proses perencanaan strategis sehingga harus disusun secara konsisten yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2016 – 2021 adalah *Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan harapan sasaran tersebut bisa memberikan hasil yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD

V. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Untuk sasaran pada tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sasaran dengan penetapan target indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Ket
Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	92,71	
	Cakupan Peningkatan Sarana & Prasarana	100	91,86	
	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100	97,58	
	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	85,14	
	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	83,24	
	Tingkat Kinerja Pelayanan pada Alat Kelengkapan dan Anggota DPRD	100	90,3	

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2019

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 pada sekretariat DPRD telah diupayakan menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Penganggaran ini juga disebut sebagai Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang nantinya tertuang dalam APBD berbasis kinerja yang disusun didasarkan pada SPM (Standart Pelayanan Minimum) yang telah ditetapkan. Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja, maka sekretariat DPRD telah memilikiperencanaan strategik (Renstra). Dengan adanya sistem tersebut, OPD akan mengukur kinerja keuangan yang tercermin dalam APBD.

Perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

rencana kerja tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Dengan pembuatan keputusan pada seluruh tingkatan perencanaan, alokasi anggaran dan meningkatkan akuntabilitas, sebagai bagian dari proses manajemen yang berbasis kinerja yang memiliki nilai utama karena memungkinkan dilakukannya penilaian yang mendalam terhadap kinerja dan memungkinkan dilakukannya penilaian atas efektivitas manajemen kinerja khususnya pada tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang.

Adapun Program-program yang ditetapkan pada tahun 2019 pada sekretariat DPRD adalah merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen Renstra.

Dalam komponen kegiatan ini telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja kegiatan dan rencana capaiannya, berdasarkan capaian realisasi kinerja yang telah dicapai terdiri dari 54 (lima puluh empat) jenis kegiatan, 6 (Enam) jenis program dan sasaran Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja Suatu Kelompok Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Sebagai Indikator kinerja sasaran periode tahunan yang secara paralel maupun skuensial akan mendukung pencapaian setiap tujuan strategis, adapun Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran yang menggambarkan pencapaian RENSTRA SKPD.

Oleh karena itu setiap program kerja yang telah direncanakan pada Sekretariat DPRD telah didukung oleh pendanaan dan teralokasi dalam APBD 2019.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.3 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Pada dasarnya Penetapan Kinerja Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2019. Semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan, Target kinerja pada tingkat sasaran dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya, Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Penetapan kinerjadan , indikator kinerja, satuan, target serta anggaran, adapun isi dan penyajian penetapan kinerja tahun 2019 Sekretariat DPRD dapat kami sampaikan secara utuh dalam lampiran laporan ini. ***(Lampiran I)***

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2019

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tergambar dalam keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran. Target sasaran ditetapkan berdasarkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Suatu sasaran dapat memuat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran analisis capaian kinerja tahun 2019 dilakukan dengan cara pengukuran tingkat Capkin (Capaian Kinerja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 dengan realisasinya dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra yang telah dilakukan pada tahun 2019.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam tahun anggaran 2019, telah menetapkan sasaran yang akan dicapai. Satu sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan Mengaplikasikan 6 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa seluruh sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik.

Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Output	Outcome
Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	92.71	Terciptanya Akuntabilitas Kinerja & Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap Kinerja Sekretariat DPRD

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

	Cakupan Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran	100	91.86	Tersedianya Sarana & Prasarana pendukung Kinerja DPRD & Sekretariat DPRD	Terfasilitasinya Sarana & Prasarana Keperluan DPRD & Sekretariat DPRD
	Tingkat kepatuhan Disiplin Aparatur	90	97.58	Tersedianya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya aparatur yang disiplin dan patuh terhadap peraturan perundang – undangan
	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90	85.14	Terciptanya Aparatur yang handal & memiliki kompetensi dibidangnya	Meningkatnya aparatur Aparatur yang handal & memiliki kompetensi dibidangnya
	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	100	83.24	Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Laporan	Tersedianya laporan – laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
	Tingkat Kinerja Pelayanan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	90.03	Terciptanya kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Terciptanya Akuntabilitas Kinerja&Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap Kinerja Sekretariat DPRD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran ini pada tahun 2019 diaplikasikan dalam 6 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar 92.71 %.
2. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur terealisasi sebesar 91.86 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terealisasi sebesar 97.58 %
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 85.14 %
5. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 83.24 %
6. Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 90.03 %

Dalam mencapai sasaran tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan 6 (enam) indikator yaitu :

1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
2. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur
4. Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Tingkat Kinerja Pelayanan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Berkaitan dengan indikator Tingkat Kinerja Pelayanan pada Alat Kelengkapan dan Anggota DPRD dapat dijelaskan bahwa Jumlah Peraturan Perundang – Undangan yang telah disahkan pada tahun 2019 berjumlah 12 Peraturan Daerah (data rekap prolegda terlampir) dan Rapat-Rapat yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 331 kali Rapat dan 13 kali Rapat yaitu terdiri dari :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Rapat Banmus sebanyak 14 kali
2. Rapat Banggar sebanyak 13 kali
3. Rapat Pimpinan sebanyak 28 kali
4. BAPEMPERDA/BPPD sebanyak 30 kali
5. Interen Pansus sebanyak 7 kali
6. Rapat Pansus OPD sebanyak 5 kali
7. Rapat Internal Komisi sebanyak 5 kali
8. Rapat Komisi OPD sebanyak 62 kali
9. Rapat Paripurna sebanyak 67 kali
10. Rapat Fraksi sebanyak 42 kali
11. Rapat Tamu sebanyak 24 kali
12. Rapat badan Kehotmatan sebanyak 3 kali
13. Rapat seluruh Anggota sebanyak 31 kali

Meningkatnya kegiatan rapat- rapat yang dilakukan oleh DPRD pada Tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018 tentunya tidak terlepas dari peningkatan kinerja DPRD, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD tidak hanya melaksanakan kegiatan rapat – rapat.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 sampai 2016

Berdasarkan analisis obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Akuntabilitas Tahun 2019 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kesekretariatan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Analisis realisasi capaian kinerja tahun 2019 dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

NO	TAHUN	Jumlah Dana	Realisasi	NILAI CAPAIAN KERJA
1	2	3	4	5
1	2016	Rp 64.428.923.109,00	RP 60.789.862.579,00	94.35%
2	2017	Rp61.351.036.317,00	Rp47.760.987.079,00	77.85%
3	2018	Rp68.678.318.529,00	Rp61.413.875.673,00	89.42%
4	2019	Rp67.179.563.707,00	Rp60.550.383.667,00	90.13%

1. Capaian kinerja pada tahun 2016 dengan jumlah kegiatan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari presentase capaian kerja yaitu 94.35%.
2. Capaian kinerja pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu menjadi 77.85 % yang diakibatkan oleh berkurangnya program kegiatan dan defisit anggaran.
3. Pada tahun 2018, capaian kinerja meningkat menjadi 89.42%
4. Capaian kinerja tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 90.13 %

Penyusunan laporan kinerja ini adalah realisasi kinerja capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, serta sebagai acuan untuk mengupayakan peningkatan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Rencana Strategis

Berdasarkan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kesekretariatan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 pelaksana dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Rencana Strategis dapat dilihat pada **(Lampiran II)**.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas dan kinerja anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan alternatif solusi yang telah dilakukan dengan memfasilitasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh anggota DPRD yang diharapkan kinerja anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara meningkat.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang oleh sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya keuangan. Jumlah anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2019 untuk pencapaian sasaran di atas adalah sebesar Rp.60.550.383.667,- (enam puluh milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar 90,13% dari pagu anggaran Rp. 67.179.563.707,- (enam puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah). Hal ini menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD mampu melaksanakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sebesar 9,87% dari pagu yang tersedia.

F. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai dan mewujudkan sasaran sebagaimana diatas, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Indikator program tersebut yaitu :

1. Rapat – rapat dewan dengan target tahun 2019 adalah 65,00% dan realisasi 89,94%
2. Raperda yang ditetapkan menjadi Perda dengan target tahun 2019 adalah 60,00% dan realisasi 100%

3. Fasilitasi keluhan/pengaduan Masyarakat dengan target tahun 2019 adalah 77,78% dan realisasi 0,00%
4. Fasilitasi keprotokoleran dan Humas DPRD dengan target tahun 2019 adalah 100% dan realisasi 100%

Berdasarkan persentase pada indikator tersebut, permasalahan yang ditimbulkan dikarenakan belum tersedianya media informasi tentang kegiatan DPRD dan fasilitas penyampaian aspirasi serta fasilitas pengaduan masyarakat. Tindak lanjut dari permasalahan tersebut yaitu dibuatkan sistem Aplikasi penyampaian Aspirasi, aplikasi pengaduan masyarakat serta sistem informasi kegiatan DPRD.

3.2 REALISASI KEUANGAN

Berikut merupakan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 2019 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

A. Analisis Keuangan tahun 2019

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dengan membandingkan Target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan Sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran — Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) bahwa Anggaran untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 58. 123. 112. 975,- (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh tiga juta seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) dan setelah mengalami revisi Anggaran dalam APBD Perubahan 2019 yang membuat anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara ada Kenaikan Anggaran menjadi sebesar Rp. 67.179.563.707,- (enam puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah). Dan untuk Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara dalam tahun 2019 adalah sebesar Rp.60.550.383.667,- (enam puluh milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan sisa total keseluruhan Anggaran Belanja tahun anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kartanegara sebesar Rp.6.629.180.040,- (Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Puluh Juta Setatus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah).

Adapun data anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara per-31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel4 :
Laporan Keuangan Anggaran Belanja
Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

No	Uraian	DPA	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	3-4=5
	Anggaran Belanja	58.123.112.975,00	67.179.563.707,00	9.056.450.732,00
	Belanja Langsung			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.434.740.757,00	10.600.856.149,00	833.884.608,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.141.979.250,00	6.560.426.872,00	581.552.378,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	814.059.125,00	794.382.875,00	19.676.250,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.590.992.176,00	4.653.839.441,00	937.152.735,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	41.201.843.847,00	37.092.882.451,00	4.108.961.396,00
6	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	995.948.552,00	847.995.909,00	147.952.643,00
	JUMLAH	67.179.563.707,00	60.550.383.697,00	6.629.180.010,00

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada DPRD Sedangkan jika ditinjau dari hasil capaian kinerja secara Kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat Output dan Outcome belum dapat digambarkan secara Optimal. Kondisi ini disebabkan alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD khususnya kepada DPRD selalu berubah. Proses ini diharapkan dimasa mendatang dapat segera diidentifikasi guna

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

perbaikan capaian kinerja organisasi baik secara Kuantitas maupun Kualitas yang terus meningkat.

B. Tindak lanjut Evaluasi Tahun lalu

Berdasarkan hasil Evaluasi Tim Inspektorat pada Tahun 2019, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 pada sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang memperoleh predikat nilai BB (Sangat Baik) dengan nilai hasil Evaluasi 79,96 . Akan tetapi ada beberapa catatan saran / rekomendasi yang disampaikan untuk segera diperbaiki agar bisa mendapatkan hasil yang optimal pada tahun selanjutnya, hal – hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- Rencana aksi atas kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang.
- Rencana aksi atas kinerja agar mencantumkan target secara periodik atas kinerja yang dilaksanakan.
- Rencana aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan dan komponen rinci setiap periode yang dilakukan dalam mencapai kinerja.
- Rencana kinerja tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- Rencana aksi kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- Rencana aksi kinerja agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja

- Membuat system pengumpulan data kinerja (SOP) tentang bagaimana laporan data kinerja diperoleh dengan tepat dan cepat.
- Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan/dilaporkan secara berkala (bulan/triwulan/semester).
- Pengukuran kinerja agar dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi

3. Pelaporan Kinerja

- Dalam menyusun laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah agar membuat mekanisme verifikasi data internal.

- Informasi kinerja dalam SAKIP belum sepenuhnya dapat diandalkan karena dokumen pengukuran kinerja tidak ada dilampirkan.

4. Evaluasi Internal

- Agar membuat SOP pemantauan tindak lanjut hasil monitoring sebagai implementasi rencana aksi yang akan dilakukan.
- Pemantauan rencana aksi agar dibuat dan dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.
- Pemantauan rencana aksi dibuat untuk memberikan alternatif perbaikan ke masa depan.
- Hasil evaluasi rencana aksi dibuat dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

5. Pencapaian Kinerja

- Target kinerja output selaras dengan outcome yang ingin dicapai dalam RENSTRA / RENJA SKPD, kemudian melalui tahapan monitoring / evaluasi dapat di breakdown kembali pada perencanaan lima tahun yang akan datang (2017-2022).
- Hasil evaluasi kinerja dan rencana aksi segera ditindak lanjuti untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja SKPD.

Dari hasil Saran/ rekomendasi yang telah disampaikan dari hasil Laporan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018, akan segera dilakukan beberapa perbaikan kinerja dimulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada tahun 2019 sehingga Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas dapat disusun lebih cermat lagi serta memenuhi standar Akuntabilitas.

BAB IV P E N U T U P

Sebagai dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 2019 yang ingin dicapai dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran serta Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak dalam upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun dalam proses pencapaian kinerja tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan pokok yang dirasakan cukup menghambat aktivitas kinerja organisasi diantaranya adalah :

1. Terjadinya Perubahan Anggaran berdasarkan Rasionalisasi Anggaran pada APBD dan APBD-P tahun 2019 mempengaruhi Perencanaan Kerja dan Penetapan Anggaran Kinerja SKPD dimana Progres pelaksana kerja menjadi terganggu karena harus menunggu persetujuan perubahan Anggaran yang mengalami penambahan maupun pengurangan sesuai RKA dan DPA yang telah direvisi.
2. Terjadinya Defisit Anggaran yang di alami oleh Kabupaten Kutai Kartanegara membuat Perencanaan Kerja dan Penetapan Anggaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, akhirnya berdampak pada kegiatan – kegiatan.
3. Belum jelasnya tujuan kunjungan kerja komisi dan pansus sehingga belum adanya ketetapan biaya yang diperlukan setiap kunjungan/perjalanan dinas.
4. Banyaknya Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan berkenaan dengan sempitnya waktu pelaksanaan.

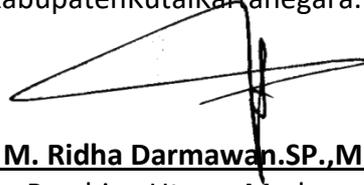
Adapun upaya dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja tahun 2019 dan tahun yang akan datang dapat terwujud apa bila saran dan solusi yang akan dilakukan di antaranya:

- a. Melakukan Peningkatan Displin Kerja Pegawai dan Prilaku pegawai dengan terus melakukan pengawasan kegiatan secara berkala dan berjenjang sesuai struktu rorganisasi dan Tupoksi masing-masing.
- b. Meningkatkan komunikasi, koordinasi serta konsultasi dengan pimpinan dan anggota DPRD,dan seluruh pegawai agar seluruh aktivitas program kerja DPRD
- c. Perlunya Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD dibidang administrasi dan hokum administrasi Negara dengan upaya mengikut para pegawai dalam berbagai Pelatihan Teknis.
- d. Dapat terintegrasi dengan baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- e. Melakukan koordinasi dengan PPTK agar disetiap pencairan dana sebaiknya melihat kepada kesiapan dana di SPD agar bisa tepat dalam merincikan dana yang akan dicairakan guna tepat sasaran dalam mempertanggung jawabkan belanja kegiatan yang dikelola oleh PPTK.

Demikian yang dapat kami laporkan, untuk dapat dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut.serta sebagai bahan pertimbangan laporan tahun berikiutnya.

Tenggarong, Februari 2020

Sekretaris DPRD
KabupatenKutaiKartanegara.



H. M. Ridha Darmawan.SP.,MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA / PENETAPAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,290,452,265	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kesekretariatan yang akuntabel dan Transparan	Jumlah Surat	800 Surat Keluar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,441,000	
	Meningkatkan Fasilitasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Rekening	48 rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,584,000,000	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kesekretariatan yang akuntabel dan Transparan	Jumlah Orang	55 Orang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	660,610,200	
	Meningkatkan Fasilitasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	M 2	11643.80M2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	910,055,125	

	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Buah	4028 item	Penyediaan Alat Tulis Kantor	642,910,750
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Bahan Bacaan	38352 Exemplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	197,451,500
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Kaleng / Kemasan / Kotak / Botol	9504 Item	Penyediaan Makanan dan Minuman	836,015,750
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Orang / Bulan	141 Orang	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	2,262,218,880
	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan perkembangan Organisasi	Jumlah Jenis	4480 Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	402,957,000
	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan perkembangan Organisasi	Jumlah Orang / Hari	218 Orang/Hari	Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi kedalam daerah dan Keluar Daerah	540,995,400

	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Orang	30 Orang	Penyediaan Jasa Pamdal Sekretariat DPRD	472,541,160
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Orang	4 Orang	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	1,617,728,200
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Even	2 Even	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu	152,527,300
2		Cakupan Layanan Sarana dan Perasarana Aparatur	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,413,163,750
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Item	259 Item	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	911,975,600
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Paket / Jenis	368 item	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	824,493,000
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Unit	4 Unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah jabatan	626,790,400
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Unit	10 Unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	774,556,200
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Unit	47 Unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional	1,238,731,650
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Unit	100Unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan rumah jabatan / Dinas	316,664,700
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Unit	595 Unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	782,287,500
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Mebeleur	47 Unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	87,664,700
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD		2 Bangunan	Pembuatan jembatan dari ruang Paripurna dan Toilet untuk Pimpinan	850,000,000
3		Cakupan peningkatan kapasitas pegawai	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	793,659,125

	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Stel	491 Pasang	Penyediaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	793,659,125
4		Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	459,194,390
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kesekretariatan yang akuntabel dan Transparan	Jumlah Orang	40 Orang	Bimbingan Teknis Pokok - Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	359,194,390
		Jumlah Orang	1 Dokumen	Fasilitasi Tim BEKIAS	100,000,000
5		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Kinerja dan Keuangan	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,296,392,110
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kesekretariatan yang akuntabel dan Transparan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev	250,000,000
		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Penilaian Layanan Sekretariat DPRD	150,000,000
		Dokumen	4 Dokumen	Peningkatan Penatausahaan dan Verifikasi Pembukuan	159,483,700
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD		1 Kegiatan	Pemilihan Wakil Kepala Daerah	391,621,910
		Kegiatan	13 Kegiatan	Penatausahaan Perbendaharaan	65,000,000
		Jumlah Konsultasi dan Koordinasi	17 Kegiatan	Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD Dengan Tim TP4D	350,000,000
		Jumlah Raperda	4 Raperda	Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk Hukum Daerah	1,036,114,100
	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan	Jumlah media massa dan Elektronik	8 Media Massa dan Elektronik	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa	2,180,567,600

	kebutuhan, tentang informasi dan perkembangan organisasi	Jumlah System	1 System Website	Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara	100,000,000
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Fasilitas	18 Kecamatan	Fasilitas Penjangkaran Aspirasi	128,604,800
		Jumlah Fasilitas Keprotokoloran	18 Kali Kunjungan	Fasilitas Pelayanan Keprotokoloran Pimpinan dan Anggota DPRD	385,000,000
			2 Dokumen	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100,000,000
6		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada alat-alat kelengkapan DPRD Propensi/Kabupaten/Kota	100%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	34,570,251,335
	Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Hearing/dialog	250 kali	Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	350,000,000
		Jumlah Paripurna	75 Kali Paripurna	Rapat - rapat Paripurna	1,200,000,000
		Jumlah Rapat	240 Kali	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	1,100,000,000
		Jumlah Reses	3 Kegiatan	Reses Anggota Dewan	4,500,000,000
		Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja	85 Kali	Rapat-rapat dan kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi I	3,750,000,000
		Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja	85 Kali	Rapat-rapat dan kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi II	3,750,000,000
		Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja	90 Kali	Rapat-rapat dan kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi III	4,100,000,000
		Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja	85 Kali	Rapat-rapat dan kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi IV	3,750,000,000
		Jumlah Rapat	41 Kali	Rapat-rapat dan kunjungan Kerja Bagi Pimpinan	4,000,000,000

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Kebutuhan, Tantangan dan Perkembangan Organisasi	Jumlah Raperda / Non Raperda	6 Raperda / Non Raperda	Uji Pablik Raperda dan Produk Hukum Daerah	374,440,000
Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja	10 Raperda	Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum Daerah	5,417,959,600
	Jumlah Diklat/Worshop/Bimtek	45 Orang	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	1,401,309,735
		1 Buku	Koordinasi Pelaporan Data Rencana Aksi Nasional (RANHAM)	75,000,000
		1 Software	Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat	150,000,000
		1 Buku	Tim Evaluasi Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kab. Kukar	251,542,000
		2 Dokumen	Pasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat	100,000,000
	2 Rapat	Rapat Koordinasi FKPD dan Massyarakat	300,000,000	
JUMLAH				57,823,112,975

PLT. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
EDI DAMANSYAH

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
H. M. RIDHA DARMAWAN, SP.,MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19701117 199803 1 008

LAMPIRAN III
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE : 4.01.04.01

NO	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
				SATUAN	(%)
1	3	4	5	6	7
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Surat Keluar	800 Surat Keluar	Surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 rekening	48 rekening	rekening	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	55 Orang	50 Orang	Orang	90.91
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11643.80 M2	11643.80 M2	M2	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4028 Buah	4028 Buah	Buah	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38352 Exemplar	38352 Exemplar	Exemplar	100
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	9504 Item	9504 Item	Item	100
8	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	141 Orang/ Bulan	131 Orang/ Bulan	Orang	91.60
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4480 Jenis	4480 Jenis	Jenis	100
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	218 Orang / Hari	218 Orang / Hari	Orang	100
11	Pamdal Sekretariat DPRD	13 Orang	13 Orang	Orang	100
12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga pimpinan DPRD	4 Orang	4 Orang	Orang	100
13	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari Tertentu	2 Even	2 Even	Even	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	259 Item	259 Item	Item	100
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	386 Item	386 Item	Item	100
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	4 Unit	4 Unit	Unit	100
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10 Unit	10 Unit	Unit	100
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	47 Unit	47 Unit	Unit	100
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	100 Unit	100 Unit	Unit	100
20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	595 Unit	555 Unit	Unit	93.28

21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	47 Unit	45 Unit	Unit	95.74
22	Pembuatan Jembatan dari ruang paripurna dan toilet untuk pimpinan	2 Bangunan	2 Bangunan	Bangunan	100
23	inventarisasi barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				100
24	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	419 Pasang	419 Pasang	Pasang	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur				
25	Bimbingan Teknis Pokok - Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	40 Orang	40 Orang	Orang	100
26	Fasilitasi Tim Bekias	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	100
VI	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan				
27	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta monev	6 Dokumen	6 Dokumen	Dokumen	100
28	Penilaian layanan sekretariat DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	100
29	Peningkatan Penatausahaan dan Verifikasi Pembukuan	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	100
30	Peningkatan Penatausahaan Perbendaharaan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	Kegiatan	100
31	Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D	17 Kegiatan	-	Kegiatan	-
32	Penyusunan Naskah akdemis raperda prakarsa DPRD dan produk hukum daerah	4 Raperda	4 Raperda	Raperda	100
33	Penyebaran informasi kegiatan DPRD pada media massa	8 media massa dan elektronik	7 media massa dan elektronik	media massa dan elektronik	87.50
34	Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara	1 system website	1 system website	system website	100
35	Fasilitasi Penjaringan Aspirasi	18 Kecamatan	18 Kecamatan	Kecamatan	100
36	fasilitasi pelayanan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD	18 kali kunjungan	18 kali kunjungan	kali kunjungan	100
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				
37	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	250 Kali	250 Kali	Kali	100
38	Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	240 Kali	240 Kali	Kali	100
39	Rapat-Rapat Paripurna	75 Kali Paripurna	75 Kali Paripurna	Kali	100
40	Reses Anggota DPRD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kegiatan	100
41	Rapat Rapat Kerja Alat Kelengkapan	85 Kali	85 Kali	Kali	100

	Komisi I				
42	Rapat Rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi II	85 Kali	85 Kali	Kali	100
43	Rapat Rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi III	90 Kali	90 Kali	Kali	100
44	Rapat Rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi IV	85 Kali	85 Kali	Kali	100
45	Rapat Rapat dan kunjungan kerja Bagi Pimpinan	41 Kali	41 Kali	Kali	100
46	Uji Publik Raperda dan Produk Hukum Daerah	6 Raperda/ Non Raperda	-	-	-
47	Peningkatan Kapasita Anggota DPRD	45 Orang	45 Orang	Orang	100
48	Koordinasi pelaporan data rencana aksi nasional (RANHAM)	-	-	-	-
49	Sistem aplikasi pengaduan masyarakat	1 Software	1 Software	Software	100
50	Tim evaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD kab, Kukar	1 Buku	-	Buku	-
51	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	100
52	Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum Daerah	10 Raperda	10 Raperda	Raperda	100
53	Rapat Koordinasi FKPD dan masyarakat	2 Rapat	2 Rapat	Rapat	100
54	Pemilihan wakil kepala daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	100

LAMPIRAN IV
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE : 1.20.04.01

NO.	URAIAN KEGIATAN	TARGET 2018	PAGU DANA 2018 APBD	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TARGET 2019	PAGU DANA 2019 APBD	REALISASI KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 10,938,356,825.00	Rp. 9,700,251,717.00	100%	Rp. 11,434,740,757.00	Rp. 10,600,856,149.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Surat keluar	Rp. 10,441,000.00	Rp. 10,392,000.00	800 Surat Keluar	Rp. 10,441,000.00	Rp. 10,435,200.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.60 Rekening	Rp. 1,712,337,600.00	Rp. 1,398,255,281.00	48 Rekening	Rp. 1,715,431,992.00	Rp. 1,418,071,423.00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30 Orang	Rp. 782,535,200.00	Rp. 679,323,025.00	55 orang	Rp. 710,660,200.00	Rp. 611,712,300.00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Buah	Rp. 702,277,000.00	Rp. 688,066,650.00	5030 buah	Rp. 942,910,750.00	Rp. 937,076,650.00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.87 Jenis	Rp. 435,730,800.00	Rp. 421,830,800.00	604500 Jenis	Rp. 465,763,500.00	Rp. 462,622,300.00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	exemplar	Rp. 206,563,400.00	Rp. 199,115,800.00	38352 exemplar	Rp. 197,451,500.00	Rp. 197,431,600.00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.77 Porsi	Rp. 925,423,000.00	Rp. 910,449,250.00	11500 Item	Rp. 1,236,015,750.00	Rp. 1,230,295,150.00
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Keluar Daerah	219 Orang/Hari	Rp. 840,995,400.00	Rp. 691,011,851.00	296 Orang/Hari	Rp. 740,995,400.00	Rp. 725,041,999.00
10	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	2184 Orang/Bulan	Rp. 2,499,099,840.00	Rp. 1,979,007,422.00	141 Orang/Bulan	Rp. 2,262,218,880.00	Rp. 1,926,657,308.00

11	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	2 Even	Rp. 90,126,300.00	Rp. 82,272,600.00	2 Even	Rp. 152,527,300.00	Rp. 144,462,800.00
12	Pamdal Sekretariat DPRD	50 Orang	Rp. 405,048,460.00	Rp. 402,617,700.00	30 Orang	Rp. 472,541,160.00	Rp. 467,185,950.00
13	Penyusunan perencanaan Sekretariat Dewan	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
14	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Rp. 856,719,375.00	Rp. 814,233,763.00	11643.80 M2	Rp. 910,055,125.00	Rp. 893,183,779.00
15	Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	4 Orang	Rp. 1,471,059,450.00	Rp. 1,423,675,575.00	4 Orang	Rp. 1,617,728,200.00	Rp. 1,576,679,690.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp. 5,735,153,281.00	Rp. 4,386,658,930.00	100%	Rp. 7,141,979,250.00	Rp. 6,560,426,872.00
16	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
17	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21 Paket/Jenis	Rp. 519,312,500.00	Rp. 475,912,500.00	387 Item	Rp. 1,259,791,100.00	Rp. 1,253,894,815.00
18	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15 Paket/Jenis	Rp. 1,241,267,881.00	Rp. 1,087,947,975.00	324 Item	Rp. 1,105,493,000.00	Rp. 1,075,416,000.00
19	Pengadaan Mebeleur	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	-	Rp. 644,732,200.00	Rp. 486,986,580.00	4 Unit	Rp. 626,790,400.00	Rp. 612,723,893.00
21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	-	Rp. 903,748,000.00	Rp. 603,520,936.00	10 Unit	Rp. 774,556,200.00	Rp. 733,152,850.00
22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	20 Unit	Rp. 1,279,608,200.00	Rp. 843,966,139.00	47 Unit	Rp. 1,238,731,650.00	Rp. 886,270,580.00
23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	-	Rp. 240,959,000.00	Rp. 135,931,400.00	100 Unit	Rp. 316,664,700.00	Rp. 304,535,535.00
24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Rp. 782,287,500.00	Rp. 705,244,600.00	595 Unit	Rp. 782,287,500.00	Rp. 688,380,099.00
25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	200 Buah	Rp. 123,238,000.00	Rp. 47,148,800.00	47 Unit	Rp. 87,664,700.00	Rp. 70,701,600.00

26	Pembuatan Jembatan dari Ruang Paripurna dan Toilet untuk Pimpinan	1 Unit	Rp -	Rp -	2 Bangunan	Rp. 850,000,000.00	Rp. 847,000,300.00
27	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Rp -	Rp -	2 Dokumen	Rp. 100,000,000.00	Rp. 88,351,200.00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	Rp. 127,648,800.00	Rp. 126,378,800.00	100%	Rp. 814,059,125.00	Rp. 794,382,875.00
28	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	166 Stell	Rp. 127,648,800.00	Rp. 126,378,800.00	564 Stel	Rp. 814,059,125.00	Rp. 794,382,875.00
29	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
30	Peyediaan Pakaian Dinas anggota DPRD dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Rp. 1,197,515,590.00	Rp. 119,272,200.00	100%	Rp. 995,948,552.00	Rp. 847,995,909.00
31	Bimbingan Teknis Pokok-Pokok Kebijakan serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	90 Oranng	Rp. 1,197,515,590.00	Rp. 119,272,200.00	85 Oranng	Rp. 895,948,552.00	Rp. 807,903,909.00
32	Fasilitasi Tim BEKIAS	-	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp. 100,000,000.00	Rp. 40,092,000.00
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp. 9,625,310,764.00	Rp. 9,217,591,586.00	100%	Rp. 5,590,992,176.00	Rp. 4,653,839,411.00
33	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp. 25,000,000.00	Rp. 17,898,800.00	-	Rp -	Rp -
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	-	Rp -	Rp -	6 Dokumen	Rp. 383,063,400.00	Rp. 374,574,514.00

35	Penilaian Layanan Sekretariat DPRD	-	Rp -	Rp -	1 Dokumen	Rp. 150,000,000.00	Rp. 137,004,400.00
36	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
37	Penyusunan RENJA Set. DPRD	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
38	Penyusunan LAKIP/ LKJIP Set. DPRD Kab. Kukar	1 Dokumen	Rp. 25,000,000.00	Rp. 21,968,800.00	-	Rp -	
39	Penyusunan Penetapan kinerja (TAPKIN) Set. DPRD	1 Dokumen	Rp. 25,000,000.00	Rp. 21,968,800.00	-	Rp -	Rp -
40	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan(RKT) Set. DPRD Kab. Kukar	1 Dokumen	Rp. 25,000,000.00	Rp. 15,898,800.00	-	Rp -	Rp -
41	Peningkatan Penatausahaan dan Verifikasi Pembukuan	4 Dokumen	Rp. 159,483,700.00	Rp. 150,636,900.00	4 Dokumen	Rp. 209,483,700.00	Rp. 199,078,500.00
42	Asdeski(Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia)	26 orang	Rp. 388,621,910.00	Rp. 324,231,627.00	-	Rp -	Rp -
43	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Set.DPRD	10 Kegiatan	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
44	Peningkatan Penatausahaan Perbendaharaan	3 Kegiatan	Rp. 50,000,000.00	Rp. 44,459,650.00	21 Kegiatan	Rp. 118,158,576.00	Rp. 109,569,600.00
39	Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi Set.DPRD	1 Dokumen	Rp. 117,000,000.00	Rp. 81,448,800.00	-	Rp -	Rp -
40	Konsultasi dan Koordinasi Set.DPRD dengan Tim TP4D	17 Notulen	Rp. 350,000,000.00	Rp. 93,635,500.00	17 Kegiatan	Rp. 350,000,000.00	Rp -
41	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2020	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
42	Penyusunan LPPD di Sekretariat DPRD	1 Dokumen	Rp. 125,000,000.00	Rp. 122,288,755.00	-	Rp -	Rp -
43	Penyusunan Indikator Kinerja Utama Set. DPRD		Rp -	Rp -		Rp -	Rp -

44	Kegiatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Set. DPRD	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
45	Review Renstra SKPD Sekretariat DPRD 2010 - 2015	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
46	Revisi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
47	Monitoring dan Evaluasi Penganggaran di Sekretariat DPRD	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
48	Penyusunan pelaporan keuangan	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
49	Penyusunan TAPKIN Set. DPRD,LKP/LKPJ	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
50	Fasilitasi Penyelesaian kewajiban pada pihak ketiga	82 Kontrak Tagihan	Rp. 8,335,205,154.00	Rp. 8,323,155,154.00	-	Rp -	Rp -
51	Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakarsa DPRD dan Produk Hukum Daerah	-	Rp -	Rp -	4 Raperda	Rp. 1,036,114,100.00	Rp. 877,752,684.00
52	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Masa	-	Rp -	Rp -	8 Media Massa dan Elektronik	Rp. 2,530,567,600.00	Rp. 2,203,466,150.00
53	Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kukar	-	Rp -	Rp -	1 System Website	Rp. 150,000,000.00	Rp. 149,940,626.00
54	Fasilitasi Penjaringan Aspirasi	-	Rp -	Rp -	18 Kecamatan	Rp. 128,604,800.00	Rp. 91,179,800.00

55	Fasilitasi Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD	-	Rp -	Rp -	25 kali kunjungan	Rp. 535,000,000.00	Rp. 511,273,137.00
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	Rp. 41,054,333,269.00	Rp. 37,827,690,119.00	100%	Rp. 41,201,843,847.00	Rp. 37,092,882,451.00
56	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	250 Kali	Rp. 350,000,000.00	Rp. 341,781,000.00	285 Kali	Rp. 400,000,000.00	Rp. 387,386,750.00
57	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	240 Kali	Rp. 1,350,000,000.00	Rp. 1,209,478,200.00	268 Kali	Rp. 1,233,174,800.00	Rp. 1,217,395,200.00
58	Rapat-Rapat Paripurna	75 Kali Paripurna	Rp. 1,000,000,000.00	Rp. 985,829,500.00	84 Kali Paripurna	Rp. 1,350,000,000.00	Rp. 1,337,823,500.00
59	Kegiatan RESES anggota	3 Kegiatan	Rp. 4,500,000,000.00	Rp. 4,157,327,683.00	2 Kegiatan	Rp. 4,325,468,000.00	Rp. 2,866,900,600.00
60	Rapat-rapat kerja alat kelengkapan Komisi I	91 Kali	Rp. 4,368,280,550.00	Rp. 3,704,373,098.00	97 Kali	Rp. 4,150,000,000.00	Rp. 3,790,062,806.00
61	Rapat-rapat kerja alat kelengkapan Komisi II	30 Kali	Rp. 4,418,280,550.00	Rp. 4,287,988,551.00	97 Kali	Rp. 4,150,000,000.00	Rp. 3,910,764,973.00
62	Rapat-rapat kerja alat kelengkapan Komisi III	40 Kali	Rp. 4,778,280,550.00	Rp. 4,595,203,364.00	99Kali	Rp. 4,540,000,000.00	Rp. 4,399,428,685.00
63	Rapat-rapat kerja alat kelengkapan Komisi IV	55 Kali	Rp. 4,368,280,550.00	Rp. 4,150,861,130.00	97 Kali	Rp. 4,150,000,000.00	Rp. 4,023,130,228.00
64	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
65	Penyusunan Raperda Prakasa dan Non Raperda	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
66	Seminar, Lokakarya, Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD		Rp -	Rp -		Rp -	Rp -
67	Seminar, Workshop, dan Lokakarya	45 Orang	Rp. 2,002,998,500.00	Rp. 1,815,397,840.00	-	Rp -	Rp -

68	Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
69	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
70	Study Komperatif mengenai Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
71	Desiminasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
72	Desiminasi ,Sosialisasi,Uji Publik Raperda dan Non Raperda	2 Raperda/Non Raperda	Rp. 71,841,400.00	Rp. 61,189,750.00	-	Rp -	Rp -
73	Rapat-Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD dan Tokoh Masyarakat	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
74	Rapat-Rapat Koordinasi Bagi Pimpinan DPRD	57 Kali	Rp. 5,100,000,000.00	Rp. 4,430,144,657.00	50 Kali	Rp. 4,600,000,000.00	Rp. 4,432,371,585.00
75	Fasilitasi Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Kali Kunjungan	Rp. 432,502,400.00	Rp. 395,610,675.00	-	Rp -	Rp -
76	Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakarsa DPRD dan Produk Hukum Daerah	4 Reperda	Rp. 1,159,128,569.00	Rp. 1,071,547,437.00	-	Rp -	Rp -
77	Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum DaerahPemerintah Daerah	20 Raperda menjadi Perda	Rp. 6,400,000,000.00	Rp. 6,319,229,784.00	16 raperda	Rp. 8,855,304,600.00	Rp. 8,231,903,878.00
78	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada Media Massa	8 Media Massa dan Elektronik	Rp. 300,000,000.00	Rp. 124,004,250.00	-	Rp -	Rp -

79	Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kukar	1 System Website	Rp. 150,000,000.00	Rp. 78,135,000.00	-	Rp -	Rp -
80	Kegiatan Fasilitas Rakor Sekretaris DPRD Se-Kaltim	1 Kegiatan	Rp. 150,000,000.00	Rp -	-	Rp -	Rp -
81	Fasilitasi Penjaringan Aspirasi	18 Kecamatan	Rp. 154,740,200.00	Rp. 99,588,200.00	-	Rp -	Rp -
82	Penjaringan Tenaga Ahli dan Pakar / Tim Ahli	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
83	Sistem Aplikasi Penyediaan Produk Persidangan & Pengarsipan pada Persidangan DPRD	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
84	Pekerjaan Aplikasi Sistem Dukungan Informasi dan Kebijakan Komisi - Komisi	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
85	Konsultasi Koordinasi Pemerintahan dan Kemasarakatan	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
86	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah hak keuangan dan administrasi pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
87	Uji Publik Raperda dan Produk Hukum Daerah	-	Rp -	Rp -	0 Raperda/Non Raperda	Rp -	Rp -
88	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	-	Rp -	Rp -	45 Orang	Rp. 2,283,520,035.00	Rp. 2,025,590,048.00
89	Koordinasi Pelaporan Data Rencana Aksi Nasional (RANHAM)	-	Rp -	Rp -	0 Buku	Rp -	Rp -
90	Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat	-	Rp -	Rp -	1 software	Rp.	Rp.

			-	-		150,000,000.00	95,149,000.00
91	Tim Evaluasi Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kab. KUKAR	-	Rp -	Rp -	1 Buku	Rp. 251,542,000.00	Rp. 10,648,800.00
92	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat	-	Rp -	Rp -	2 Dokumen	Rp. 100,000,000.00	Rp. 33,144,200.00
93	Rapat koordinasi FKPD dan Masyarakat	-	Rp -	Rp -	3 Rapat	Rp. 450,000,000.00	Rp. 175,460,100.00
94	Pemilihan wakil Kepala Daerah	-	Rp -	Rp -	1 Kegiatan	Rp. 212,834,412.00	Rp. 155,722,098.00
VII	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Rp -	Rp -	100%	Rp -	Rp -
95	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan	-	Rp -	Rp -	-		
96	Penyusunan Daftar Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah dilingkungan Sekretariat DPRD	-	Rp -	Rp -	-		
97	Penyusunan Daftar Usulan Barang Milik Daerah dilingkungan Sekretariat DPRD	-	Rp -	Rp -	-		
98	Study Komperatif Penyusunan APBD/APBD-P Set. DPRD	-	Rp -	Rp -	-		
99	Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Status Barang Milik Daerah dilingkungan Sekretariat DPRD	-	Rp -	Rp -	-		
100	Inventarisasi dan Kodifikasi Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD Kab. Kukar	-	Rp -	Rp -	-		
101	Penyusunan DRKBMD / DRKPMD dilingkungan Set. DPRD	-	Rp -	Rp -	-		
102	Penatausahaan dan Pengaman Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD	-	Rp -	Rp -	-		

103	Penatausahaan dan Pengaman Barang Rusak dilingkungan Set. DPRD	-	Rp -	Rp -	-		
104	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran / RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Set. DPRD Thn 2016.	-	Rp -	Rp -	-		
VIII	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Rp -	Rp -	100%	Rp -	Rp -
105	Inspeksi Mendadak (Sidak) DPRD dalam rangka Pengawasan Pembangunan Daerah	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
IX	Program Penyediaan Data / Informasi	100%	Rp -	Rp -	100%	Rp -	Rp -
106	Penyusunan Bahan Bacaan Garda Rakyat dan Website DPRD Kab. Kukar	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
107	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada Media Massa	8 Media Massa dan Elektronik	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
108	Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kukar	2 Kegiatan	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
109	Aplikasi Administrasi Perjalanan Dinas	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
110	Penyerapan Aplikasi Elektronik Tata Naskah berbagai Keputusan Alat Kelengkapan DPRD	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
111	Penghapusan dan Pemusnahan Arsip - Arip yang tidak penting / kadaluarsa	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
112	Pemuktahiran Arsip Surat Masuk / Keluar Penting Tahun 2010 - 2015	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -

113	Website DPRD Kutai Kartanegara	1 System Website	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
114	Pembuatan Aplikasi informasi produk DPRD	1 Software	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -
115	Press gethering	2 Kegiatan	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
X	Non Program						
116	Non Kegiatan						
			Rp. 68,678,318,529.00	Rp. 61,377,843,352.00		Rp. 67,179,563,707.00	Rp. 60,550,383,667.00
SILPA				Rp. 7,300,475,177.00			Rp. 6,629,180,040.00

LAMPIRAN V
RENCANA KERJA TAHUN 2019 DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	TARGET	PAGU DANA		BERTAMBAH / BERKURANG	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN
			KINERJA	APBD	APBD-P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	4.01.4.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 10,590,452,265.00	Rp. 11,434,740,757.00	Rp. 844,288,492.00	Rp. 10,600,856,149.00	Rp. 833,884,608.00
	4.01.4.01.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Surat Keluar	Rp. 10,441,000.00	Rp. 10,441,000.00	Rp. -	Rp. 10,435,200.00	Rp. 5,800.00
	4.01.4.01.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Rekening	Rp. 1,584,000,000.00	Rp. 1,715,431,992.00	Rp. 131,431,992.00	Rp. 1,418,071,423.00	Rp. 297,360,569.00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	4.01.4.01.04.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	55 Orang	Rp. 660,610,200.00	Rp. 710,660,200.00	Rp. 50,050,000.00	Rp. 611,712,300.00	Rp. 98,947,900.00
	4.01.4.01.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5030 Buah	Rp. 742,910,750.00	Rp. 942,910,750.00	Rp. 200,000,000.00	Rp. 937,076,650.00	Rp. 5,834,100.00
	4.01.4.01.04.01.01.19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	604500 Jenis	Rp. 402,957,000.00	Rp. 465,763,500.00	Rp. 62,806,500.00	Rp. 462,622,300.00	Rp. 3,141,200.00
	4.01.4.01.04.01.01.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38352 Exemplar	Rp. 197,451,500.00	Rp. 197,451,500.00	Rp. -	Rp. 197,431,600.00	Rp. 19,900.00
	4.01.4.01.04.01.01.16	Penyediaan Makanan dan Minuman	11500 item	Rp. 1,036,015,750.00	Rp. 1,236,015,750.00	Rp. 200,000,000.00	Rp. 1,230,295,150.00	Rp. 5,720,600.00
	4.01.4.01.04.01.01.20	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	296 Orang/Hari	Rp. 540,995,400.00	Rp. 740,995,400.00	Rp. 200,000,000.00	Rp. 725,041,999.00	Rp. 15,953,401.00
	4.01.4.01.04.01.01.18	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	141 Orang	Rp. 2,262,218,880.00	Rp. 2,262,218,880.00	Rp. -	Rp. 1,926,657,308.00	Rp. 335,561,572.00

LAMPIRAN V
RENCANA KERJA TAHUN 2019 DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

	4.01.4.01.04.01.01.33	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari Tertentu	2 Even	Rp. 152,527,300.00	Rp. 152,527,300.00	Rp -	Rp. 144,462,800.00	Rp. 8,064,500.00
	4.01.4.01.04.01.01.31	Penyediaan Jasa Pamdal Sekretariat DPRD	30 Orang	Rp. 472,541,160.00	Rp. 472,541,160.00	Rp -	Rp. 467,185,950.00	Rp. 5,355,210.00
	4.01.4.01.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11643.80 M2	Rp. 910,055,125.00	Rp. 910,055,125.00	Rp -	Rp. 893,183,779.00	Rp. 16,871,346.00
		Peyusunan Perencanaan Sekretaris Dewan	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	4.01.4.01.04.01.01.32	Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	4 Orang	Rp. 1,617,728,200.00	Rp. 1,617,728,200.00	Rp -	Rp. 1,576,679,690.00	Rp. 41,048,510.00
II	4.01.4.01.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp. 6,513,163,750.00	Rp. 7,141,979,250.00	Rp. 628,815,500.00	Rp. 6,560,426,872.00	Rp. 581,552,378.00
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	4.01.4.01.04.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	387 Item	Rp. 911,975,600.00	Rp. 1,259,791,100.00	Rp. 347,815,500.00	Rp. 1,253,894,815.00	Rp. 5,896,285.00
	4.01.4.01.04.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	324 Item	Rp. 824,493,000.00	Rp. 1,105,493,000.00	Rp. 281,000,000.00	Rp. 1,075,416,000.00	Rp. 30,077,000.00
		Pengadaan Mebeleur	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	4.01.4.01.04.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	4 Unit	Rp. 626,790,400.00	Rp. 626,790,400.00	Rp -	Rp. 612,723,893.00	Rp. 14,066,507.00
	4.01.4.01.04.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10 unit	Rp. 774,556,200.00	Rp. 774,556,200.00	Rp -	Rp. 733,152,850.00	Rp. 41,403,350.00
	4.01.4.01.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	47 Unit	Rp. 1,238,731,650.00	Rp. 1,238,731,650.00	Rp -	Rp. 886,270,580.00	Rp. 352,461,070.00
	4.01.4.01.04.01.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	100 Unit	Rp. 316,664,700.00	Rp. 316,664,700.00	Rp -	Rp. 304,535,535.00	Rp. 12,129,165.00

LAMPIRAN V
RENCANA KERJA TAHUN 2019 DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

	4.01.4.01.04.01.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	595 Unit	Rp. 782,287,500.00	Rp. 782,287,500.00	Rp -	Rp. 688,380,099.00	Rp. 93,907,401.00
	4.01.4.01.04.01.02.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	47 Unit	Rp. 87,664,700.00	Rp. 87,664,700.00	Rp -	Rp. 70,701,600.00	Rp. 16,963,100.00
		Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor dan Rumah Jabatan	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	4.01.4.01.04.01.02.69	Pembuatan Jembatan dari Ruang Paripurna dan Toilet untuk Pimpinan	2 Bangunan	Rp. 850,000,000.00	Rp. 850,000,000.00	Rp -	Rp. 847,000,300.00	Rp. 2,999,700.00
	4.01.4.01.04.01.02.73	Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Rp. 100,000,000.00	Rp. 100,000,000.00	Rp -	Rp. 88,351,200.00	Rp. 11,648,800.00
III	4.01.4.01.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	Rp. 793,659,125.00	Rp. 814,059,125.00	Rp. 20,400,000.00	Rp. 794,382,875.00	Rp. 19,676,250.00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	564 Stell	Rp. 793,659,125.00	Rp. 814,059,125.00	Rp. 20,400,000.00	Rp. 794,382,875.00	Rp. 19,676,250.00
IV	4.01.4.01.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Rp. 459,194,390.00	Rp. 995,948,552.00	Rp. 536,754,162.00	Rp. 847,995,909.00	Rp. 147,952,643.00
	4.01.4.01.04.01.05.12	Bimbingan Teknis Pokok-Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Orang	Rp. 359,194,390.00	Rp. 895,948,552.00	Rp. 536,754,162.00	Rp. 807,903,909.00	Rp. 88,044,643.00
	4.01.4.01.04.01.05.13	Fasilitasi Tim BEKIAS	1 Dokumen	Rp. 100,000,000.00	Rp. 100,000,000.00	Rp -	Rp. 40,092,000.00	Rp. 59,908,000.00
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
V	4.01.4.01.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Rp. 4,804,770,200.00	Rp. 5,590,992,176.00	Rp. 786,221,976.00	Rp. 4,653,839,411.00	Rp. 937,152,765.00

LAMPIRAN V
RENCANA KERJA TAHUN 2019 DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

4.01.4.01.04.01.06.24	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev	6 Dokumen	Rp. 250,000,000.00	Rp. 383,063,400.00	Rp. 133,063,400.00	Rp. 374,574,514.00	Rp. 8,488,886.00
4.01.4.01.04.01.06.30	Penilaian Layanan Sekretariat DPRD	1 Dokumen	Rp. 150,000,000.00	Rp. 150,000,000.00	Rp. -	Rp. 137,004,400.00	Rp. 12,995,600.00
4.01.4.01.04.01.06.31	Peningkatan Penatausahaan dan Verifikasi Pembukuan	4 Dokumen	Rp. 159,483,700.00	Rp. 209,483,700.00	Rp. 50,000,000.00	Rp. 199,078,500.00	Rp. 10,405,200.00
4.01.4.01.04.01.06.33	Penatausahaan Perbendaharaan	21 kegiatan	Rp. 65,000,000.00	Rp. 118,158,576.00	Rp. 53,158,576.00	Rp. 109,569,600.00	Rp. 8,588,976.00
4.01.4.01.04.01.06.34	Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D	17 Dokumen	Rp. 350,000,000.00	Rp. 350,000,000.00	Rp. -	Rp. -	Rp. 350,000,000.00
4.01.4.01.04.01.06.35	Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk Hukum Daerah	4 Raperda	Rp. 1,036,114,100.00	Rp. 1,036,114,100.00	Rp. -	Rp. 877,752,684.00	Rp. 158,361,416.00
4.01.4.01.04.01.06.36	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa	8 Media Massa dan Elektronik	Rp. 2,180,567,600.00	Rp. 2,530,567,600.00	Rp. 350,000,000.00	Rp. 2,203,466,150.00	Rp. 327,101,450.00
4.01.4.01.04.01.06.37	Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara	1 System Website	Rp. 100,000,000.00	Rp. 150,000,000.00	Rp. 50,000,000.00	Rp. 149,940,626.00	Rp. 59,374.00
4.01.4.01.04.01.06.38	Fasilitasi Penjaringan Aspirasi	18 Kecamatan	Rp. 128,604,800.00	Rp. 128,604,800.00	Rp. -	Rp. 91,179,800.00	Rp. 37,425,000.00
4.01.4.01.4.01.06.39	Fasilitasi Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD	25 kali Kunjungan	Rp. 385,000,000.00	Rp. 535,000,000.00	Rp. 150,000,000.00	Rp. 511,273,137.00	Rp. 23,726,863.00
4.01.4.01.4.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Buku Laporan	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -

LAMPIRAN V
RENCANA KERJA TAHUN 2019 DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp -				
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Rp -				
	4.01.4.01.4.06.34	Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	1 Dokumen	Rp -				
	4.01.4.01.4.06.35	Penyusunan LAKIP / LKjIP Set. DPRD Kab. Kukar	1 Dokumen	Rp -				
	4.01.4.01.4.06.36	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Set. DPRD Kab. Kukar	1 Dokumen	Rp -				
		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 - 2020.	1 Dokumen	Rp -				
		Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016.	40 Buku	Rp -				
	4.01.4.01.4.06.37	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Set. DPRD Kab. Kutai Kartanegara.	1 Dokumen	Rp -				
	4.01.4.01.4.06.38	Peningkatan Penatausahaan Pembukuan	4 Dokumen	Rp -				
	4.01.4.01.4.06.39	Asdeski (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia)	26 Orang	Rp -				
	4.01.4.01.4.06.40	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Set. DPRD	10 Kegiatan	Rp -				
	4.01.4.01.4.06.41	Peningkatan Penatausahaan Perbendaharaan	3 Kegiatan	Rp -				

LAMPIRAN V
RENCANA KERJA TAHUN 2019 DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

4.01.4.01.4.06.42	Penyusunan Dokumen Reformasi birokrasi Sekretariat DPRD	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
-------------------	---	--------------	---------	---------	---------	---------	---------

LAMPIRAN VI
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2019	PENCAPAIAN %	KESIMPULAN
Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Rapat-Rapat Anggota DPRD Kab. Kukar	Prosentase Penyelenggaraan Rapat-Rapat yang Sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%	Jumlah Rapat-rapat tahun 2019 sebanyak 331 kali
	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disahkan	100%	100%	100%	Peraturan daerah yang disahkan 2019 sebanyak 12 Perda
Tercapainya Pelayanan Optimal Kepada Anggaran DPRD Kab. Kukar	Prosentase Responden Anggota DPRD yang Puas Atas Layanan Sekretariat DPRD Kab. Kukar				

LAMPIRAN VII
RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN & RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

N O	BULAN	BANMUS	BANGGAR	RAPAT PIMPINAN	BPPD / BAPEMPERDA	BADAN KEHORMATAN	INTEREN PANSUS	RAPAT PANSUS OPD	RAPAT INTERNAL KOMISI	RAPAT KOMISI OPD	PARIPURNA	RAPAT FRAKSI	TAMU	RAPAT SEKRETARIAT	RAPAT SELURUH ANGGOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JANUARI	2 Kali		1 Kali	1 Kali		2 Kali			8 Kali	8 Kali	1 Kali	Kali		3 Kali
2	FEBRUARI	1 Kali		7 Kali						7 Kali		7 Kali	3 Kali		5 Kali
3	MARET	1 Kali		4 Kali	1 Kali		1 Kali			7 Kali	2 Kali	8 Kali	1 Kali		3 Kali
4	APRIL	1 Kali		4 Kali	1 Kali		1 Kali			7 Kali	2 Kali		3 Kali		2 Kali
5	MEI	2 Kali	3 Kali	1 Kali						3 Kali	8 Kali				4 Kali
6	JUNI	3 Kali	1 Kali	2 Kali						5 Kali	4 Kali	1 Kali	2 Kali		4 Kali
7	JULI			3 Kali						9 Kali	5 Kali		2 Kali		2 Kali
8	AGUSTUS		5 Kali	1 Kali	2 Kali					1 Kali	12 Kali	6 Kali	3 Kali		3 Kali
9	SEPTEMBER				12 Kali						7 Kali	11 Kali	2 Kali		2 Kali
10	OKTOBER	3 Kali		1 Kali	3 Kali	2 Kali			5 Kali	8 Kali	3 Kali	5 Kali	3 Kali		1 Kali
11	NOPEMBER	1 Kali	4 Kali	2 Kali	6 Kali	1 Kali	3 Kali	5 Kali		6 Kali	13 Kali	3 Kali	2 Kali		1 Kali
12	DESEMBER			2 Kali	4 Kali					1 Kali	3 Kali		3 Kali		1 Kali
JUMLAH RAPAT		14 Kali	13 Kali	28 Kali	30 Kali	3 Kali	7 Kali	5 Kali	5 Kali	62 Kali	67 Kali	42 Kali	24 Kali		31 Kali
TOTAL RAPAT						331 Kali									

Keterangan Rapat Paripurna :
- Rapat Paripurna Batal 5 kali



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2019

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Sekwan/DPRD
Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD
U P B : SEKRETARIAT DPRD

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	173,891,907,694.01
1	Tanah	34,200,000,000.00
2	Peralatan dan Mesin	65,941,964,154.01
2	Alat-alat Besar	0.00
3	Alat-alat Angkutan	20,977,905,361.00
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	601,009,000.00
5	Alat Pertanian	157,500,000.00
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	38,928,137,119.00
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2,382,389,884.00
8	Alat-alat Kedokteran	0.00
9	Alat Laboratorium	2,877,522,790.01
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	17,500,000.00
03	Gedung dan Bangunan	71,417,704,240.00
11	Bangunan Gedung	71,417,704,240.00
12	Monumen	0.00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,169,227,300.00
13	Jalan dan Jembatan	827,927,300.00
14	Bangunan Air/Irigasi	0.00
15	Instalasi	157,000,000.00
16	Jaringan	184,300,000.00
05	Aset Tetap Lainnya	1,082,387,000.00
17	Buku dan Perpustakaan	956,110,000.00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	126,277,000.00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0.00
20	Papan Struktur Organisasi Instansi	0.00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00
	ASET LAINNYA	80,625,000.00
07	Aset Lainnya	80,625,000.00
01	Aset Lainnya	0.00
21	Aset Kondisi Rusak Berat	0.00
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0.00
24	Aset Tidak Berwujud	80,625,000.00